

Model Pengembangan Pertanian Melalui Pembangunan Greenhouse di Desa Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun

Development Model of Agriculture Through Greenhouse Construction in Banjarsari Kulon Village, Madiun Regency

Oleh:

^{1*}Inhu Wahid Dhiya 'Ulhaq, ¹Nanda Harda Pratama Meiji

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No 5 Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang (65145)

*email: inhu.wahid.1907516@students.um.ac.id

Received: February 23, 2023; Revised: March 26, 2024; Accepted: March 27, 2024

ABSTRAK

Upaya pemerintah Desa Banjarsari Kulon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun *greenhouse* sebagai program ketahanan pangan skala desa. *Greenhouse* tersebut mengalami kemacetan pembangunan hingga tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan latar belakang serta permasalahan yang terjadi pada pembangunan *greenhouse*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat memperoleh data secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan *greenhouse* tersebut dilatarbelakangi oleh peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang dana desa mengalokasikan sebesar 20% untuk ketahanan pangan. Pembangunan tersebut bersifat *Top-Down* sehingga tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi pada *greenhouse* adalah tidak tersedianya pengairan, perubahan anggaran, kurangnya partisipasi dan tidak adanya tindakan yang solutif dari pemerintah maupun masyarakat. Konsep *developmentalisme* yang diterapkan oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dianggap gagal dalam mengatasi kemiskinan. Contoh pembangunan yang ada dalam konsep pembangunan secara linear dengan mengencarkan pembangunan fisik berharap kuatnya aspek ekonomi, maka aspek lainnya akan mengikuti. Jalan keluar bagi pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual.

Kata kunci: Pertanian, Ketahanan Pangan, Pembangunan.

ABSTRACT

The Banjarsari Kulon Village government's efforts to improve people's welfare by building greenhouse as a village-scale food security program. Greenhouse experienced development bottlenecks so that there was no follow-up from the village government. Therefore, this research was conducted to identify and describe the background and problems that occur in greenhouse development. This research uses descriptive qualitative methods with observation strategies, interviews and documentation so as to obtain in-depth data. The results of the research show that the construction of the greenhouse was motivated by presidential regulation number 104 of 2021 concerning village funds to allocate 20% for food security. The development is Top-Down in nature so it does not involve the community in development. The problems that occur in the greenhouse are the unavailability of irrigation, budget changes, lack of participation and no solution from the government or the community. The understanding of developmentalism adopted by the government in the welfare of its people is considered to have failed in overcoming poverty. Linear development by intensifying

physical development hopes that the economic aspect will be strong, then other aspects will follow. The way out for the government in the welfare of its people by paying attention to various aspects, namely economic, political, cultural, environmental and personal/spiritual.

Keywords: *Agriculture, Food Security, Development.*

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan menjadi suatu strategi yang cukup efektif guna pemeratakan ekonomi di seluruh penjuru negeri. Dengan memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan kuat, maka sebuah negara atau daerah dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, seluruhnya akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal proses ekonomi di dalamnya. Pembangunan di suatu negara sangat penting dan harus dilakukan secara cepat guna menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Dengan begitu, maka banyak lowongan pekerjaan yang tercipta dan banyak perusahaan atau pihak-pihak yang menanamkan modal di negara tersebut (Kementerian Investasi, 2017).

Pembangunan merupakan upaya untuk memajukan, memperbaiki serta meningkatkan suatu nilai yang sudah ada. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai peradaban kehidupan sosial kebudayaan atas dasar target yang sudah ditetapkan. Dalam pembangunan, masyarakat memiliki peran andil karena masyarakat merupakan aset yang sangat penting dalam tatanan negara. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, maka dianggap tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang mengetahui secara langsung permasalahan mereka serta mengerti strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut (Jamaludin, 2016).

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting guna menjaga

dan membina kestabilan sosial ekonomi. Kondisi tersebut juga dapat menjaga dan meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diperlukan peranan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi guna mengatur kegiatan perekonomian di seluruh negeri. Dengan kebijakan-kebijakan yang solutif maka bangsa Indonesia mengalami kemajuan sehingga masyarakat semakin sejahtera. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta menggali potensi-potensi masyarakat diperlukan untuk mendongkrak ekonomi supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Zaman et al., 2021). Seluruh elemen harus terlibat saling terintegrasi dan saling membangun untuk menciptakan kekuatan ekonomi yang hebat sehingga dapat bersaing di kancah global.

Pembangunan pertanian merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya untuk para petani. Hal ini merupakan target kementerian pertanian pada saat tahun 2010-2014 yang mengupayakan kesejahteraan petani di Indonesia. Hal ini berangkat dari permasalahan kemiskinan di pedesaan yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai petani sejumlah 18,48 juta dari total penduduk pedesaan (Ramdhani, Akhmad Nulhaqim, & Fedryansah, 2015). Menurut BPS (2020) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi guna memenuhi kebutuhan pokok makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Kondisi ini merupakan hal krusial yang harus segera ditangani oleh pemerintah serta seluruh elemen masyarakat.

Salah satu program untuk menangani kasus tersebut di Desa Banjarsari Kulon dibangun sebuah *greenhouse*. Bangunan tersebut sebagai tonggak perekonomian dan

ketahanan pangan skala desa bagi masyarakat di Desa Banjarsari Kulon. Greenhouse merupakan suatu teknologi di bidang pertanian yang berguna untuk pembudidayaan tanaman. Indonesia notabene merupakan negara beriklim tropis maka teknologi ini dipilih oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon untuk menunjang kegiatan agribisnis sehingga dapat meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, meminimalkan penggunaan pestisida serta dapat digunakan sebagai sarana agrowisata (Faisal, 2019). Dengan begitu, maka kesejahteraan masyarakat Banjarsari Kulon semakin meningkat karena sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon untuk kegiatan produksi pertanian.

Greenhouse yang ada di Banjarsari Kulon merupakan bangunan letak pembangunan tersebut berada di wilayah desa sendiri dengan menggunakan tanah kas desa (Bengkok). Tanah Bengkok merupakan aset desa sebagai kekayaan desa yang wajib digunakan untuk kesejahteraan desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Dwiwana, 2016). Tanah Bengkok yang digunakan untuk membangun greenhouse sebelumnya merupakan tanah gersang. pemanfaatan tanah bengkok untuk membangun greenhouse diambil sebanyak 6 x 18 meter sebanyak 2 bangunan.

Namun dari tanggal peresmian pada awal 2022, hingga saat ini bulan November 2022, *greenhouse* tersebut masih mengalami kemacetan dalam hal pembangunan dan pengelolaan. Dari data yang diperoleh dari lapangan, greenhouse tersebut awalnya akan dikelola oleh Gapoktan Banjarsari Kulon untuk pembibitan berbagai jenis tanaman. Desa Banjarsari Kulon sendiri terdapat 7 kelompok tani, yaitu Poktan Segoro Lele, Poktan Babad Panggang, Poktan Sekandang 1, Poktan Sekandang 2, Poktan Ngudi Utomo, Poktan Al Huda, dan Poktan Bangkit yang seluruhnya tersebar di Desa Banjarsari Kulon. Informasi lainnya secara agraria, Desa Banjarsari Kulon memiliki

luas lahan pertanian sangat luas. Lahan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sawah dengan luas 496 Ha, Pekarangan seluas 54,6 Ha dan Ladang seluas 12 Ha.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seharusnya dengan greenhouse dikelola oleh Gapoktan Banjarsari kulon guna menunjang produksi pertanian. Sehingga banyak petani yang disesatkan melalui pembibitan tanaman di greenhouse tersebut. Perbedaan pendapat muncul ketika data lapangan terbaru muncul, greenhouse tersebut akan dikelola oleh PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). ketidakpastian rencana pengelolaan di greenhouse membawa dampak terhadap kualitas pertanian yaitu menghambat kemajuan dari pertanian Desa Banjarsari Kulon itu sendiri dan tidak terlaksananya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun. Seharusnya bangunan tersebut dapat dimanfaatkan secepatnya oleh masyarakat Desa Banjarsari Kulon untuk menaikkan taraf perekonomian masyarakat.

Penelitian yang serupa juga dilakukan terkait pembangunan desa sebagai kunci utama dalam mensejahterakan masyarakat desa khususnya petani di Indonesia. dengan mengadopsi teknologi pertanian, maka petani dapat memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan penerapan teknologi (tanaman baru, kualitas unggul yang tinggi atau teknologi produksi yang baru) (Apri dan Mariono, 2014). Pada bidang pertanian diperlukan inovasi-inovasi guna meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia. karena di sektor pertanian sendiri, mengalami penurunan karena beralih pada bidang non pertanian. Pemanfaatan teknologi juga memberi sumbangsih dalam hal pertanian, yaitu di Kabupaten Sleman diciptakan ekonomi pertanian digital. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya petani dan mendukung ketahanan pangan di kabupaten Sleman. Ada juga terdapat permasalahan terkait kepemilikan akses, literasi, infrastruktur, kelengkapan informasi,

ketanggapan respon *developer*, dan ketersediaan aplikasi (Wibowo, 2020).

Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam pengembangan desa produktif. Bentuk dari partisipasi masyarakat Desa Colo adalah melalui partisipasi ide atau buah pikir, tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, serta harta benda. Partisipasi masyarakat menumbuhkan semangat membangun di desa Colo. Partisipasi buah pikiran lebih banyak diberikan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti Pokdarwis, PMPH, Gapoktan, dan YM2SM. Sedangkan partisipasi tenaga, kemahiran, dan keterampilan serta harta benda diberikan baik oleh kelompok masyarakat maupun individu (Wardani dan Kurnianingtyas, 2021).

Desa Bunghu merupakan kawasan persawahan yang memiliki keanekaragaman dan berpotensi tinggi. Dengan potensi tersebut dapat memuaskan jika dikelola dengan baik. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebut belum memiliki tenaga terampil dan profesional guna memanfaatkan potensi yang ada. Namun pembangunan di Desa Bunghu masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja. Kurangnya pembangunan desa, BUMDes, kewirausahaan, lumbung desa, pemberdayaan serta sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat (Lisnawati dan Lestari, 2019).

Kemiskinan merupakan tantangan yang besar bagi sebuah rezim pemerintahan. Namun, pada kenyataannya UU Desa, sebagai contoh di Kabupaten Bantul masih menjadi solusi pembangunan yang kurang bermakna karena tumpang tindih kebijakan. Kondisi seperti ini membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan di kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah daerah masih bersifat semu dan tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan. Ditemukan bahwa Bappeda Kabupaten Bantul, dalam merancang

program pembangunan dengan metode pemberdayaan masyarakat ditemukan adanya inkonsistensi pemerintah (Rahmat, Izzudin dan Kudir, 2015).

Pasca pandemi Covid-19 diperlukan mendongkrak pangan di seluruh wilayah. Strategi ketahanan pangan dalam program *urban farming* di masa pandemi Covid-19 oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya. Kota Surabaya telah berhasil menangani tantangan pemenuhan kebutuhan pangan pasca pandemi COVID-19. Evaluasi didasarkan pada lima indikator: prioritas pembangunan ekonomi pertanian perkotaan, pemenuhan pangan pasca COVID-19, pemberdayaan masyarakat melalui program Urban Farming, promosi dan edukasi terkait program tersebut, serta penanganan keamanan dan mutu pangan segar. Pemerintah Kota Surabaya terbukti secara efektif memainkan peran penting dalam hal ini (Wardah dan Niswah, 2021).

Dilihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada kemacetan pengelolaan *greenhouse* sebagai ketahanan pangan di wilayah desa. Pembangunan *greenhouse* oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon digunakan sebagai program ketahanan pangan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemacetan pembangunan dan pengelolaan tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih mendalam terkait latar belakang pembangunan dan permasalahan pembangunan *greenhouse* di Desa Banjarsari Kulon di bidang pertanian dalam menciptakan ketahanan pangan skala desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif juga disebut dengan metode penelitian *naturalistik*. Hal ini karena penelitian secara kualitatif dilaksanakan saat kondisi alamiah dengan data-data yang bersifat interpretatif (Sugiyono, 2015). Jenis penelitian ini adalah

deskriptif. Dengan memfokuskan pada jawaban pertanyaan penelitian dengan pertanyaan siapa, apa dimana dan bagaimana atas suatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi sehingga dikaji secara mendalam untuk memunculkan pola-pola atas kejadian tersebut (Kim, Sefcik, dan Bradway, 2017). Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah guna mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan terkait permasalahan pembangunan *greenhouse* di Desa Banjarsari Kulon untuk program ketahanan pangan.

Lokasi penelitian berada di Desa Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan di desa tersebut terdapat kawasan lahan bengkok desa yang dibangun *greenhouse* untuk program ketahanan pangan. Namun sampai saat ini belum ada pengelolaan dari bangunan tersebut karena terjadi kemacetan. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Banjarsari Kulon menjadi tertunda. Oleh karena itu, lokasi ini relevan dengan topik dan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Dengan kemampuan peneliti dalam memperhatikan, bertanya, mengamati, memahami dan melacak suatu fakta maka hal tersebut tidak dapat digantikan dengan cara lain, maka dalam penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di Desa Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun (Sugiyono, 2015). Peneliti hadir di lokasi penelitian dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Dengan peneliti hadir di lokasi penelitian, maka data yang diperoleh dapat secara maksimal sehingga peneliti memahami kenyataan yang ada di lokasi penelitian dan dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat maupun pemerintah Desa Banjarsari Kulon.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan melakukan observasi, wawancara kepada informan, dokumentasi, dan data sekunder yang mampu memberikan informasi tambahan

serta menguatkan data primer dalam penelitian. Dimana dalam menentukan informan menggunakan *Non-probability Sampling* dengan teknik *Snowball Sampling*. Data yang mulanya berjumlah sedikit seiring berjalannya waktu akan membesar sehingga data tersebut dapat diperoleh secara mendalam karena mendapatkan informan lain atas rekomendasi oleh informan yang sudah diwawancarai (Sugiyono, 2015). Informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1.

Informan Penelitian

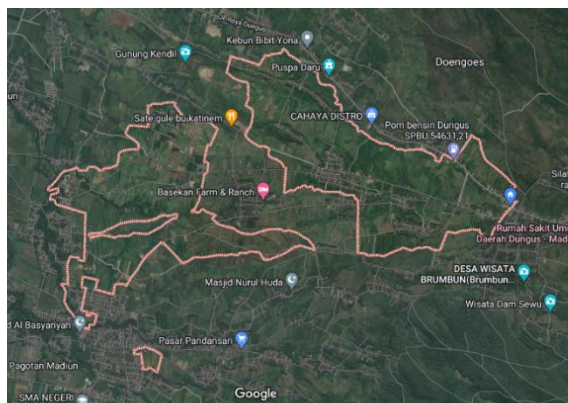
NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Subjek Penelitian
2	Plt. Sekretaris Desa	Subjek Penelitian
3	Ketua Tim Pembangunan	Subjek Penelitian
4	Ketua Tim Pengelola	Subjek Penelitian
5	BPD Desa Banjarsari Kulon / Ketua Gapoktan	Subjek Penelitian
6	Sekretaris PKK	Subjek Penelitian
7	Penjabat Kepala Desa (2021-2022)	Subjek Penelitian
8	Kepala Dusun Banjarsari	Subjek Penelitian
9	Bendahara Desa	Subjek Penelitian
10	Kepala Urusan Umum	Subjek Penelitian
11	Karyawan Administrasi	Subjek Penelitian
12	Masyarakat Sekitar	Subjek Penelitian
13	Tokoh Masyarakat	Subjek Penelitian
14	Karyawan BPD	Subjek Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Analysis Interactive* model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam menganalisis data dengan beberapa bagian, yaitu : pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).

Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk mengetahui sebuah standar kebenaran dari suatu data yang diambil ketika penelitian berlangsung terhadap informan. Dengan menggunakan jenis triangulasi metode dan triangulasi sumber, maka data dapat dinyatakan valid apabila tidak ditemukan perbedaan antara yang ditemukan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat Desa Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun



Sumber : (Google, 2023).

Gambar 1.

Peta Desa Banjarsari Kulon

Desa Banjarsari Kulon merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Madiun dengan luas 6.350 Ha. Terbagi menjadi 39 Rukun Tetangga dan 14 Rukun Warga. Jumlah penduduk mencapai 6.553 Jiwa dengan laki-laki sebanyak 3.229 dan perempuan sebanyak 3.324. Mayoritas penduduk di Desa Banjarsari Kulon bermata pencaharian sebagai Petani. Selain petani juga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai, buruh tani, PNS, dan pedagang.

Tabel 2.

Pekerjaan Masyarakat Desa Banjarsari Kulon.

No	Pekerjaan	LK	PR	Jumlah
1	Petani	922	150	1.072
2	Buruh Tani	300	230	520
3	PNS	56	140	194
4	TNI POLRI	5	-	5

Sumber : Data Pemerintah Desa Banjarsari Kulon

Frekuensi panen padi di Desa Banjarsari Kulon rata-rata sebanyak 3 x panen dalam jangka waktu 1 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa keadaan ekonomi masyarakat rata-rata menengah namun juga masih terdapat kemiskinan yang ada di Desa Banjarsari Kulon. Jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah tergolong banyak dalam

kecamatan Dagangan. Dalam 1 kecamatan, terbagi menjadi 17 desa dengan total penerima bantuan sebanyak 4.896 Keluarga dan 21.404 jiwa. Di Desa Banjarsari Kulon sendiri penerima bantuan dari pemerintah sebanyak 584 keluarga dan 3.031 jiwa dengan pembagian jenis bantuan sebagai berikut:

Tabel 3.

Data Penerima Bantuan Sosial Desa Banjarsari Kulon tahun 2022.

Program Keluarga Harapan	Bantuan Pangan Non Tunai Sembako	Jaminan Kesehatan Nasional	PBID Kab. Madiun
174	410	1.654	1.377

Sumber: Data Pemerintah Desa Banjarsari Kulon.

Kondisi pertanian di Desa Banjarsari Kulon tergolong tradisional. Jenis tanaman yang ada di Desa Banjarsari Kulon didominasi oleh tanaman padi dan tebu. Banyak petani yang masih enggan menggunakan teknologi terbaru seperti alat menanam padi, alat pemanen padi dan sebagainya. Mereka lebih memilih untuk menggunakan tenaga manusia sebagai alat untuk menggarap lahan. Namun hal tersebut tidak seluruhnya tradisional, terdapat juga sebagian petani yang sudah mulai mengembangkan pertaniannya dengan berbagai inovasi, seperti halnya yang sudah diterapkan oleh Poktan Sekandang 2 dengan membuat bibit padi modern. Selain itu, juga Poktan-Poktan lainnya yang ada di Desa Banjarsari Kulon berinovasi pada pupuk organik, pembibitan dan lain-lain dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Kurangnya pengembangan pertanian di wilayah Desa Banjarsari Kulon dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

Faktor biaya

Pengelolaan pertanian dengan menggunakan teknologi terbaru seperti alat penanam padi otomatis dan *Combine Harvester* memang memerlukan biaya yang tinggi dalam pengoperasiannya. Para petani enggan menggunakan alat seperti itu karena biaya untuk sewa tidak bisa menutupi biaya

produksi. Apabila dipaksakan untuk menggunakan alat tersebut, maka petani mengalami kerugian. Mayoritas petani mengandalkan tenaga manusia ketika mereka pada masa tanam dan panen. Dengan menggunakan tenaga manusia, biaya lebih ekonomis sehingga petani lebih banyak mendapatkan keuntungan.

Faktor sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia petani di Desa Banjarsari Kulon didominasi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia kisaran usia 50-60 tahun. Hal ini tentunya tidak mampu mengantisipasi tantangan sistem produksi yang kian hari semakin meningkat sehingga hasil bersih yang diterima petani semakin turun. Fenomena ini berdampak pada generasi muda berpendidikan yang enggan untuk berkecimpung dalam dunia pertanian. Mereka lebih memilih bekerja di sektor industri dan perkantoran. Akibatnya, tenaga kerja dengan pendidikan yang terbatas dan keterampilan yang minim membanjiri sektor pertanian hingga melebihi kapasitas daya tampung. Hal ini berimplikasi pada kepemilikan lahan dan garapan per kepala keluarga menurun sehingga pendapatan petani semakin sulit ditingkatkan (Rozaki et al., 2006).

Wawasan petani akan penggunaan alat-alat modern belum memadai. Hal ini terjadi karena masyarakat petani di Desa Banjarsari Kulon enggan untuk mencoba hal baru. Seperti berinovasi pada tanaman padi atau tanaman yang lain. Meskipun ada beberapa yang berinovasi, namun mereka banyak memilih untuk menggunakan metode yang sudah mereka terapkan sebelumnya, karena banyak petani yang beranggapan bahwa ketika kebutuhan pribadi mereka sudah terpenuhi maka tidak memikirkan hal lainnya ke arah yang lebih maju.

Faktor kondisi lahan

Kondisi lahan pertanian di Desa Banjarsari Kulon berada di lereng gunung yang berbentuk terasering. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk masuknya alat-

alat berat untuk digunakan sebagai pengelolaan lahan. Oleh sebab itu, petani yang memiliki lahan di daerah sulit dijangkau oleh alat tersebut memilih menggunakan tenaga manusia. Terdapat juga problematika pada tenaga manusia, yaitu jumlah tenaga yang minim menjadikan proses produksi terhambat. Adanya hal tersebut menunjukkan diperlukan solusi agar proses produksi padi di Desa Banjarsari Kulon meningkat.

Latar Belakang Pembangunan *Greenhouse* Sebagai Upaya Menciptakan Ketahanan Pangan di Desa Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Banjarsari Kulon, maka pemerintah Desa Banjarsari Kulon berupaya meningkatkan fasilitas pertanian. Upaya tersebut guna menciptakan ketahanan pangan skala desa. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka dibangun 2 bangunan *greenhouse* yang terdapat di tanah bengkok milik Desa Banjarsari Kulon. *Greenhouse* diresmikan pada Februari 2022 oleh kepala Desa Banjarsari Kulon. *Greenhouse* tersebut digunakan sebagai tempat pembibitan tanaman seperti sawi, cabai, tomat, kembang kol, terong, kangkung, dan sebagainya.

Dari segi perekonomian masyarakat Desa Banjarsari Kulon, ketahanan pangan penting untuk dilakukan. Hal ini dapat menanggulangi inflasi di tingkat desa. Program ketahanan pangan dapat meminimalisir terjadinya inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara, yaitu di negara Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Zimbabwe dan Turki pada tahun 2022. Krisis yang terjadi di negara-negara tersebut dikarenakan mempunyai hutang diatas 50% dari PDB, impor lebih besar daripada ekspor dan dana penanggulangan Covid-19 di negara mereka yang besar karena nilai mata uang merosot dan tingginya inflasi (Bachtiar, 2022).

Pemerintah desa membangun *greenhouse* yang berada di RT 05 RW 2 Dusun Banjarsari Desa Banjarsari Kulon

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Pembangunan *greenhouse* diambil dari dana desa anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 54.550.000 atau 5,7% dari total keseluruhan dana desa sebesar Rp. 963.058.000. Selain dialokasikan untuk program ketahanan pangan, Dana Desa Banjarsari Kulon tahun 2022 juga digunakan untuk program pemerintahan seperti Posyandu, PKK, pembangunan infrastruktur dan program bantuan langsung tunai (BLT).

Pembuatan *greenhouse* yang bersumber dari APBDes 2022 Desa Banjarsari Kulon senilai Rp. 54.550.000, yang tentu merupakan alokasi dana desa. Pembangunan *greenhouse* sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon dilatarbelakangi oleh faktor-faktor diantaranya adalah:

Peraturan presiden nomor 104 tahun 2022

Pengalokasian dana desa harus sinkron dengan program nasional, provinsi, dan daerah. Oleh sebab itu, pada Peraturan Presiden no 104 tahun 2022 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 November 2021 terkait Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4 huruf b menyatakan bahwa “program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen)” (Peraturan Presiden RI, 2021). Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah Desa Banjarsari Kulon membangun *greenhouse* sebagai fasilitas pembibitan tanaman untuk menunjang ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon. Pembangunan tersebut bersifat *Top-Down* dari pemerintah pusat untuk program ketahanan pangan. Adanya peraturan presiden nomor 104 ini oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon diselaraskan dengan program PTP (Pemanfaatan Tanah Pekarangan) dari PKK Desa Banjarsari Kulon. pembangunan *greenhouse* sebagai penunjang program PTP untuk ketahanan pangan adalah dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga sebagai wadah untuk menanam berbagai jenis tanaman sayuran.

Program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mengendalikan inflasi di tingkat desa. Mengingat isu inflasi pada tahun yang akan datang menghantui masyarakat dunia. Pemanfaatan dana desa sebesar 20% dialokasikan untuk program ketahanan pangan dengan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga warga desa mempunyai kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga secara mandiri (Kementerian Desa, 2022).

Pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan juga direalisasikan di desa lain. Desa lainnya seperti di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo. Desa Parangjoro yang mengalokasikan dana sebesar Rp. 203.158.600 untuk program ketahanan pangan. Dana desa yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu untuk kegiatan pelatihan kelompok tani sejumlah Rp. 6.000.000 dan pengadaan Irigasi Pipanisasi Pertanian sejumlah Rp. 197.158.600. Dengan alokasi dana sebesar 20,6% maka diharapkan dapat mengembalikan stabilitas ekonomi petani pada masa pandemi Covid-19 (Pajar, Suharno, dan Yudanto, 2022).

Aspirasi masyarakat

Penentuan pembangunan *greenhouse* sebagai implementasi program ketahanan pangan adalah melalui musyawarah desa. Pada tahun 2021, elite masyarakat yaitu Pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, LPKMD, RT, RW, Gapoktan, dan PKK berpartisipasi pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Meskipun program ketahanan pangan tersebut bersifat *Top-Down*, namun harus melalui musyawarah sebagai penentuan pemerintah desa akan membangun apa. Pencetus atau ide pembangunan *greenhouse* adalah Gapoktan, dimana Gapoktan sebagai lembaga masyarakat di bidang pertanian mengajukan pengembangan pertanian mereka dengan pembangunan *greenhouse* untuk pembibitan

sebagai upaya ketahanan pangan skala desa di wilayah Desa Banjarsari Kulon.



Gambar 2.

Musrenbangdes (Muasyawah Perencanaan Pembangunan Desa)

Sumber: Dokumentasi BPD Desa Banjarsari Kulon

Berbeda halnya yang dilakukan oleh Desa Pejengkolan Kabupaten Kebumen. Dalam penyusunan sebuah anggaran untuk pembangunan desa, Desa Pejengkolan menggunakan teknik *Bottom Up* dimana partisipasi masyarakat diperlukan dalam hal ini. Pemerintah Desa Pejengkolan bersosialisasi dan membentuk Tim Pokok Kerja (TIM POKJA) yang diberi tugas untuk menyusun perencanaan pembangunan desa dari Musyawarah dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), Lokakarya Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Suroso dan Ety, 2020). Dengan strategi tersebut, maka pembangunan menyentuh langsung dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Tujuan dari pembangunan *greenhouse* adalah untuk program ketahanan pangan. Secara rinci, Gapoktan dan PKK dengan dibangunnya *greenhouse* menjadi penggerak masyarakat dalam menyongsong ketahanan pangan di wilayah Desa Banjarsari Kulon. Upaya tersebut melalui PKK yaitu program PTP (Pemanfaatan Tanah Pekarangan). Program PTP untuk memanfaatkan pekarangan rumah warga sebagai tempat menanam berbagai jenis sayuran yang dapat menyadarkan masyarakat terkait ketahanan pangan. Adanya sebuah butuhan pangan rumah tangga dapat terpenuhi dengan tersedianya berbagai jenis sayuran seperti

terong, cabai, sawi, dan sejenisnya yang cukup, baik, merata aman serta terjangkau.

Gapoktan dan PKK berkolaborasi sebagai motor penggerak masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon. Gapoktan sebagai Pegiat menyediakan bibit tanaman dan PKK sebagai penggerak masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan. Sosialisasi dari PKK bermula dari PKK desa ke PKK masing-masing dusun, setelah itu ke PKK RT dan setiap RT bersosialisasi melalui kegiatan yang diadakan masyarakat yaitu arisan atau yasinan wanita. Dengan rencana tersebut, maka diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bekerjasama menyongsong ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon.

Proses pembangunan *greenhouse* terdapat 2 kendala saat pembangunan, yaitu faktor cuaca dan faktor lokasi, *greenhouse* mulai dibangun pada bulan Januari tahun 2022 dengan kondisi cuaca hujan. Hal ini membuat para pekerja kesulitan dalam mengerjakan pondasi bangunan *greenhouse*. Selain itu, lokasi bangunan *greenhouse* tidak berada di pinggir jalan raya, sehingga untuk materialnya tidak bisa langsung menuju ke lokasi bangunan. Hal ini membuat proses pengerjaan bangunan lebih lama.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui *Greenhouse* di Desa Banjarsari Kulon

Kondisi *greenhouse* di Desa Banjarsari Kulon masih belum ada kegiatan pembibitan yang dilakukan oleh tim pengelola. Dari peresmian sampai bulan Desember 2022, *greenhouse* ini beroperasi hanya pada saat uji coba saja. Dalam bangunan tersebut dipenuhi oleh rumput liar yang tidak terawat sehingga terkesan bangunan tidak terpakai. Sayangnya, *greenhouse* tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pertanian untuk sementara waktu dimanfaatkan. Sambil menunggu kesiapan dari Pemerintah desa untuk

pembibitan sesuai rencana yang disepakati sebelumnya.

Kondisi ini sempat dipertanyakan oleh masyarakat kepada pemerintah Desa Banjarsari Kulon terkait tidak adanya kegiatan di *greenhouse*. Pemerintah desa melalui kepala desa memberikan keterangan kepada masyarakat terkait kondisi dan kendala yang sedang terjadi di *greenhouse*. Penjelasan tersebut mengenai perubahan anggaran dan tim pengelola yang belum siap. Dengan itu, maka masyarakat dapat mengerti akan kendalanya.



Gambar 3.

Kondisi Greenhouse

Sumber : Dokumentasi Peneliti (03/12/2022)

Proses pembangunan *greenhouse* terjadi kemacetan pembangunan. Terlihat pada gambar, sekilas tidak terdapat masalah. Namun permasalahan yang dibahas adalah kendala setelah bangunan *greenhouse* berdiri. Permasalahan tersebut adalah belum tersedianya saluran air, perubahan anggaran dan relawan pengelola. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dan rincian penjelasan dari masing-masing kendala adalah berikut ini.

Ketersediaan air

Air merupakan bagian yang sangat penting untuk kegiatan pembibitan. Dalam perencanaan pembangunan *greenhouse*, instalasi saluran air sudah dianggarkan oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon. kendala dari ketersediaan air adalah pengajuan pemasangan air melalui PDAM yang tidak bisa diajukan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan perbedaan anggaran

perencanaan dengan kesesuaian harga pemasangan saluran oleh PDAM. Perbedaan ini dikarenakan kenaikan harga untuk pemasangan baru PDAM di wilayah Kabupaten Madiun.

Pemerintah desa menyiasati hal tersebut dengan mengandalkan musim hujan sebagai pemasok ketersediaan air. Uji coba dilakukan ketika musim hujan tahun 2022, ketua tim pengelola memulai pembibitan tanaman cabai. Alhasil banyak tanaman yang mati dikarenakan kekurangan air. Hal ini mengakibatkan terhentinya kegiatan pembibitan pada bangunan *greenhouse*. Kegiatan pembibitan tersebut tidak beroperasi sampai pergantian tahun 2023.

Perubahan anggaran

Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) dilakukan oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon. perubahan anggaran dikarenakan perbedaan anggaran yang sudah ditetapkan dengan harga instalasi air PDAM di bangunan *greenhouse*. Pemerintah Desa Banjarsari Kulon melakukan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) pada bulan Oktober 2022. Dengan selisih harga instalasi baru PDAM yang sebelumnya dianggarkan dengan harga baru. Persetujuan perubahan anggaran kegiatan pembangunan *greenhouse* terkait instalasi air PDAM oleh kepala Desa Banjarsari Kulon direalisasikan pada bulan Desember 2022. Dengan persetujuan tersebut, maka penggunaan *greenhouse* sebagai pembibitan dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

Relawan pengelola

Sistem pengelolaan *greenhouse* yang dirancang oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya Gapoktan untuk menjadi relawan pengelola *greenhouse*. Walaupun sudah dibentuk tim pengelola oleh pemerintah desa, namun tim pengelola juga membutuhkan tenaga tambahan untuk menjadi relawan sehingga dapat memaksimalkan produksi bibit. Sistem relawan yang dirancang oleh pemerintah desa belum diterima oleh

masyarakat. hal ini dikarenakan sistem bagi hasil yang ditawarkan belum memadai. Penawaran sistem bagi hasil kepada masyarakat adalah dari total keseluruhan produksi bibit, 50% digunakan untuk program ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon. untuk 50% yang lain dijual dan keuntungan dari penjualan tersebut dipakai sebagai upah relawan yang ikut pembibitan dan untuk modalnya dikembalikan kepada pemerintah desa.

Evaluasi dan monitoring

Evaluasi dan monitoring pembangunan *greenhouse* dilakukan oleh tim dari kecamatan Dagangan pada bulan Mei 2022. Evaluasi dilakukan dengan pengecekan dana yang terpakai dengan kualitas bangunan *greenhouse*. dari hasil evaluasi dan monitoring, tidak ada masalah yang terjadi saat pembangunan, karena pengadaan instalasi air yang belum terpasang sudah dianggarkan kembali melalui PAK dengan menyesuaikan dengan harga instalasi PDAM yang baru. Permasalahan yang terjadi pada *greenhouse* adalah terkait tindak lanjut dari evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan pada bulan Mei 2022. Pemerintah desa tidak segera melakukan tindakan yang solutif guna mengatasi permasalahan tersebut. sehingga terhambatnya kegiatan pembibitan yang berimplikasi pada terhambatnya program PTP untuk ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon.

Ketidakberhasilan realisasi program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon dan masyarakat melalui *greenhouse* merupakan ketidaksinergian antara masyarakat Desa Banjarsari Kulon dengan pemerintah desa. Pembangunan tersebut tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan sebuah alat dan juga tujuan tercapainya hak asasi manusia bagi masyarakat. Pembuatan keputusan melalui partisipasi masyarakat akan lebih menyentuh kebutuhan dasar dari

masyarakat itu sendiri. Kurangnya peran dan juga sumbangsih baik itu ide, tenaga, dan keterampilan masyarakat Desa Banjarsari Kulon dalam membangun ketahanan pangan di wilayahnya sendiri berimplikasi pada pembangunan yang sedang dilakukan berbuah kegagalan. Pemerintah desa yang kurang peka dalam menganalisa kebutuhan masyarakat juga memberikan dampak serupa dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Pembangunan *greenhouse* sebagai program ketahanan pangan ini termasuk ke dalam pendekatan *Top Down Planning*. Dimana pencetus dari sebuah pembangunan adalah pemerintah pusat atau elite masyarakat tanpa harus melibatkan aspirasi dari masyarakat (Sururi, 2015). Berkaitan dengan pendekatan tersebut adalah permasalahan kooptasi. Hal ini terjadi untuk menghindari dari ancaman keberadaan dan stabilitas, dalam hal ini pemerintahan. Kooptasi dapat memastikan penguasa dapat mengatur suara-suara yang tidak setuju. Tentunya yang akan berpartisipasi adalah kelompok elite yaitu Pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, LPKMD, RT, RW, Gapoktan, dan PKK yang memiliki pengetahuan, keterampilan, percaya diri, dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan dan proses sehingga tidak memberikan ruang bagi masyarakat biasa untuk berkontribusi dalam menentukan pembangunan desa (Ife dan Tesoriero, 2008). Masyarakat sekitar di lokasi *greenhouse* juga tidak tahu akan maksud dan tujuan dari pembangunan *greenhouse*. Hal ini menandakan bahwa pembangunan tersebut tidak berawal dari permasalahan masyarakat terkait ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon.

Konsep yang diterapkan oleh negara Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya adalah *Developmentalisme*. Konsep tersebut diyakini oleh pemerintah sebagai satu satunya jalan untuk perubahan sosial menuju masyarakat yang sejahtera. Dengan menggalakkan pembangunan fisik dimana hal tersebut merupakan sebuah proses modernisasi masyarakat. mereka menganggap bahwa seluruh masyarakat

pernah mengalami tradisional yang akhirnya menjadi masyarakat yang modern. Dalam hal ini, sikap tradisional menjadi sebuah permasalahan. *Development*, diidentikkan sebagai gerakan melangkah menuju *higher modernity*. Ialah bentuk perkembangan, kemajuan teknologi, dan ekonomi seperti halnya yang terjadi pada negara-negara industri (Fakih, 2002).

Pembangunan *greenhouse* merupakan sebuah bentuk modernisasi dalam bidang pertanian, dimana sebelumnya masyarakat Desa Banjarsari Kulon bertani menggunakan metode tradisional. Sebuah kemustahilan bagi masyarakat untuk berhasil menggunakan *greenhouse* tanpa adanya pelatihan khusus untuk teknik budidaya tanaman dalam *greenhouse*. Gencarnya pembangunan fisik seperti *greenhouse* merupakan proses modernisasi yang tidak berdasarkan kebutuhan sebenarnya oleh masyarakat. dalam membangun desa, pemerintah desa memfokuskan diri hanya pada sarana fisik. Artinya, pihak desa kurang responsif dan partisipatif dalam berbagai kebutuhan masyarakat selain sarana fisik. Indikator capaian target pembangunan desa yang diukur oleh pemerintah supra desa adalah berdasarkan kelengkapan sarana prasarana infrastruktur dan kelengkapan administrasi, bukan dari kekuatan ekonomi dari sebuah desa itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada kemajuan sebuah desa diakui oleh pemerintah jika desa menjadi institusi yang tunduk untuk kepentingan birokrasi dan memperlancar proyek-proyek pembangunan fisik (Rozaki et al., 2006).

Konsep *developmentalisme* dianggap gagal dalam mengurus persoalan seperti kelas sosial, dominasi ideologi dan budaya serta persoalan gender dan lingkungan. Bahkan dianggap sebagai teori yang melanggengkan permasalahan-permasalahan tersebut. Sudah sejak lama pemerintah khususnya pemerintah Desa Banjarsari Kulon berupaya menaikkan taraf kesejahteraan masyarakatnya melalui sebuah pembangunan fisik. Namun hasilnya tidak terjadi perubahan secara signifikan

atas kemiskinan yang terjadi di Desa Banjarsari Kulon. Selain itu, *developmentalisme* juga gagal dalam menghindari sistem penindasan politik masyarakat. Konsep *developmentalisme* tidak sensitif terhadap masyarakat terutama masyarakat adat. Hal ini berdampak bahwa konsep tersebut menjadi bagian dari masalah lingkungan dari pada sebuah jalan keluar (Fakih, 2002).

Jalan keluar bagi sebuah bangsa dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah melalui pengembangan masyarakat. Tujuan daripada pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai wadah pengalaman penting bagi manusia, memenuhi kebutuhan hidup manusia dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite pemerintahan, dan lainnya yang kurang berperikemanusiaan serta sulit untuk mengaksesnya. Pengembangan masyarakat secara linear atau menitikberatkan terhadap satu aspek saja akan berbuah kegagalan dalam pengembangan masyarakat seperti halnya pengembangan ekonomi yang digencarkan maka seluruh aspek akan mengikutinya. Asumsi tersebut bukan mengambil pendekatan secara holistik. oleh karena itu, pengembangan masyarakat harus didasari oleh berbagai aspek kehidupan yaitu: pengembangan ekonomi, pengembangan politik, pengembangan budaya, pengembangan lingkungan dan pengembangan personal/spiritual. Keenam aspek tersebut harus diperhatikan dalam melaksanakan pengembangan masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang benar-benar sehat dan berfungsi (Ife dan Tesoriero, 2008).

Pengembangan masyarakat di suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain tergantung pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat terbagi menjadi lima prinsip. Namun dalam hal ini bukanlah merupakan resep “bagaimana melakukannya”. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1) prinsip ekologis meliputi :

holisme, berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, dan perkembangan yang seimbang. 2) prinsip keadilan sosial dan HAM meliputi: mengatasi struktur yang merugikan, mengatasi wacana-wacana yang merugikan, pemberdayaan, hak asasi manusia (HAM), dan definisi kebutuhan. 3) menghargai yang lokal meliputi: menghargai pengetahuan lokal, menghargai budaya lokal, menghargai sumber daya lokal, menghargai keterampilan masyarakat lokal, menghargai proses lokal, dan partisipasi. 4) prinsip-prinsip proses meliputi: proses, hasil dan visi, integritas proses, menumbuhkan kesadaran, kerja sama dan konsensus, langkah pembangunan, perdamaian dan anti kekerasan, inklusivitas dan membangun masyarakat. 5) prinsip-prinsip global dan lokal meliputi: menghubungkan yang lokal dan global serta praktik anti kolonialis (Ife dan Tesoriero, 2008).

SIMPULAN

Tingginya tingkat kemiskinan di Desa Banjarsari Kulon berdampak pada kebijakan pemerintah Desa Banjarsari Kulon untuk melakukan pembangunan *greenhouse* pada tahun 2022. Sesuai peraturan presiden nomor 104 tahun 2022 tentang alokasi dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan. Pembangunan *greenhouse* tersebut berbuah kegagalan dalam menciptakan ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon. Ketidaksinergian pemerintah desa dengan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan dikarenakan tidak adanya sosialisasi pembangunan. Pembangunan *greenhouse* bersifat *Top-Down* tidak melibatkan masyarakat sehingga tidak menyentuh akar permasalahan yang sedang terjadi di Desa Banjarsari Kulon. Pembangunan tersebut terhenti karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Desa Banjarsari Kulon untuk mengeluarkan kebijakan yang solutif untuk ketahanan pangan. Konsep *developmentalisme* yang selama ini diterapkan oleh pemerintah dalam

mensejahterakan rakyat nyatanya tidak membuat rakyat menjadi lebih baik. Pembangunan di desa didasarkan pada kepentingan-kepentingan elite pemerintah desa, sehingga yang merasakan dampak adalah kelompok yang berkepentingan saja. Kesenjangan sosial sangat terlihat antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Pembangunan di Desa Banjarsari Kulon lebih dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu yaitu Gapoktan dan PKK. Pengembangan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan aspek ekonomi saja. Namun harus memperhatikan berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Apri, K., dan Mariono, J. (2014). Adopsi Teknologi Pertanian Untuk Pembangunan Pedesaan: Sebuah Kajian Sosiologis. *Agriekonomika*, 3.
- Bachtiar, A. (2022). Krisis Ekonomi Dunia 2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*.
- BPS. (2020). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diambil 18 Oktober 2022, dari Badan Pusat Statistik website: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_1/1
- Dwiyana, A. H. (2016). Kedudukan Tanah Bengkulu Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Mahkamah*, 1.
- Faisal, M. (2019). Konsep dan Manfaat Greenhouse. Diambil 18 Oktober 2022, dari Pusat Manajemen Pengetahuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada website: <https://kmc.tp.ugm.ac.id/kms/konsep-dan-manfaat-greenhouse/>
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Google. (2023). Google Maps. Diambil 4 Januari 2023, dari

- <https://www.google.co.id/maps/place/Banjarsari+Kulon,+Dagangan,+Madiun+Regency,+East+Java/@-7.6852431,111.5599638,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e79bb85cd6cc1cd:0x8f3a4a3d4b72b0c7!8m2!3d-7.6750759!4d111.5796218?hl=endanuthuser=0>
- Ife, J., dan Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Desa, P. D. T. D. T. R. I. (2022). Mendes PDTT Ungkap Langkah Kendalikan Inflasi di Desa Dengan Dana Desa. Diambil 18 Januari 2023, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia website: <https://www.kemendes.go.id/berita/viww/detil/4418/mendes-pdtt-ungkap-langkah-kendalikan-inflasi-di-desa-dengan-dana-desa>
- Kementerian Investasi. (2017). Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi. Diambil 18 Januari 2022, dari BKPM website: <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-pembangunan-infrastruktur-indonesia-untuk-investasi>
- Kim, H., Sefcik, J. S., dan Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Res Nurs Health*. <https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Lisnawati, dan Lestari, S. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4, 157–167. <https://doi.org/Prefix.10.26905>
- Pajar, Suharno, dan Yudianto, D. (2022). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Verstek*, 10(1), 17–26.
- Peraturan Presiden RI. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*. Indonesia.
- Rahmat, A., Izzudin, A., dan Kudir, S. (2015). Memperkuat Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare*, 2, 88–99.
- Ramdhani, H., Akhmad Nulhaqim, S., dan Fedryansah, M. (2015). Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 301–444.
- Rozaki, A., Sujito, A., Hudayana, B., Siahaan, H., Krisdyatmiko, Zamroni, S., Hariyantio, T. (2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan* (S. Eko dandan Krisdyatmiko, Ed.). Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suroso, A., dan Ety, R. (2020). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 4(2), 134–152.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25. <https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>
- Wardah, O. A. N., dan Niswah, F. (2021). Strategi Ketahanan Pangan Dalam

- Program *Urban Farming* di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. *Publika Jurnal Administrasi Negara*, 9, 145–160.
- Wardani, N. A., dan Kurnianingtyas, A. P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Colo, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)*, 722–731.
- Wibowo, E. T. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26, 204–228.
- Zaman, N., Syafrizal, Chaerul, M., Purba, S., Bachtiar, E., Simarmata, H. M. P., ... Hastuti, P. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kitta Menulis.